

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT



OLEH
Dr. SUPRIYANTO.,M.Si

JUDUL PENGABDIAN

Penyuluhan kewirausahaan : Memberikan Motivasi dan Pemahaman tentang Badan Usaha dan Koperasi Indonesia pada peserta Pendidikan dan pelatihan Tanaman Organik dib alai Pendidikan Yayasan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung Selatan

**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
2019**



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No : 26 Tlp 771331
Bandar Lampung 35142

SURAT TUGAS

Nomor : 332/D/FISIP-UBL/IX/2018

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tahun 2018, maka bersama ini memberi tugas kepada :

N a m a : Dr. Supriyanto, M.Si
Jabatan akademik : Lektor
Pekerjaan : Dosen PNS-DPK Universitas Bandar Lampung
A l a m a t : Jl. Abdul Kadir, No. 08/02 Rajabasa, Bandar Lampung

Untuk melaksanakan Pengabdian dibidang ilmu administrasi bisnis dengan memberikan Pelatihan Kewirausahaan dengan Memberikan Motivasi dan Pemahaman tentang badan Usaha dan Koperasi di Indonesia pada tanggal 15 September 2018 yang dilaksanakan di Balai Pendidikan Yayasan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 4 September 2018

=====



Dekan FISIP

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Telp. (0721)701979 Bandar Lampung
35142

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Buku : Pelatihan Kewirausahaan: Memberikan Motivasi dan Pemahaman tentang Badan Usaha dan Koperasi Indonesia
2. Penyusunan :
Nama : Dr. Supriyanto, M.Si
NIP : 195710011985031004
NIDN : 0001105701
Tempat Tgl Lahir : Metro, 01 Oktober 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat 1/III D
Jabatan Fungsional : Lektor
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Bidang Keahlian : Ilmu Administrasi Bisnis
3. Waktu Kegiatan : 15 September 2018
4. Bentuk Kegiatan : Pelatihan
5. Biaya : Rp. 5000.000,-
6. Sumber Dana : Mandiri

Bandar Lampung, 04 Februari 2019
Pelaksana

Dr. Supriyanto, M.Si



Dr. Yadi Lustiadi, M.Si



Dr. Hendri Dunan, S.E., M.M



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tilp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 019 / S.Ket / LPPM-UBL / II / 2019

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : Dr. Supriyanto, M.Si |
| 2. NIDN | : 0001105701 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Metro, 01 Oktober 1957 |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : III/D |
| 5. Jabatan, TMT | : Lektor |
| 6. Bidang Ilmu | : Ilmu Adm. Bisnis |
| 7. Jurusan / Program Studi | : Ilmu Adm. Bisnis |
| 8. Unit Kerja | : FISIPOL Universitas Bandar Lampung. |

Telah melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan Judul

:"Penyuluhan kewirausahaan : Memberikan Motivasi dan Pemahaman tentang Badan Usaha dan Koperasi Indonesia pada peserta Pendidikan dan pelatihan Tanaman Organik dib alai Pendidikan Yayasan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 04 Februari 2019

Kepala LPPM-UBL

Dr. Hendri Dunan, SE., M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



SUARA HATI FOUNDATION

Bandar Lampung, 10 September 2018

Nomor : 11/03/09/2018

Lampiran :

Perihal : Permohonan Narasumber Pelatihan.

Kepada Yth

Dekan FISIP – Universitas Bandar Lampung

di-

Bandar Lampung

Dengan Hormat

Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Padi Organik di Balai Pendidikan Yayasan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung, Kami atas nama Ketua Yayasan secara rutin mengajukan permohonan Narasumber untuk memberikan pelatihan Kewirausahaan: Memberikan Motivasi dan Pemahaman tentang Badan Usaha dan Koperasi Indonesia tanggal 15 September 2018. Selain memberikan Pelatihan Angkatan Ke 3 pada Pendidikan dan Pelatihan Tananam Organik Balai Pendidikan Yayasan ini sekaligus juga memberikan pendampingan yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yang dimulai pada tanggal tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan atas kesediaan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 10 September 2018

Ketua Pengelola



Ari Gunawan, SE, MM



SUARA HATI FOUNDATION

SURAT KETERANGAN

No: 25 /03/P/06/2018

Kami Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Tananam Organik atas nama Ketua Yayasan Suara Hati Foundation Bandar Lampung menerangkan bahwa;

Nama : Dr.Suriyanto, Msi

NIP : 1957 1001 1985 0310 04

N Pekerjaan : Dosen PNS-Dpk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univertas Bandar Lampung.

Pada tanggal 15 September 2018 telah mengadakan Penyuluhan Kewirausahaan: Memberikan Motivasi dan Pemahaman tentang Badan Usaha dan Koperasi Indonesia pada peserta Pendidikan dan Pelatihan Tananam Organik di Balai Pendidikan Yayasan Suara Hati Foundation Tanjung Bintang Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 15 September 2018.

Ketua Pengelola



Ari Gunawan, SE, MM



SUARA HATI FOUNDATION

DAFTAR HADIR PELATIHAN PADI ORGANIK

Tanggal: 15 September 2018

No	NAMA	ALAMAT ASAL	TANDA TANGAN
1	Teuku G	Alpha Jakarta	
2	Hadi R.	Alpha Jakarta	
3	Tulus Simanungkal	Rindang Jakarta	
4	Eko Purban	Rindang Jakarta	
5	Sigit Purnomo	Alpha Jakarta	
6	Makfud.	Alpha Jakarta	
7	Mahruf Linda	Orhiba Jakarta	
8	Ramdan	Orhiba Jakarta	
9	Joko Sunto	Orhiba Jakarta	
10			
11			
12			



DUNIA USAHA DAN KOPERASI INDONESIA

Oleh: Dr. Supiriyanto .,MSi

ABSTRAK

Dalam memasuki milenium ketiga kita dihadapkan dengan globalisasi ekonomi. Era ekonomi global tidak pernah memberi peluang bagi yang ketinggalan untuk mengejar dan tidak pernah pula menahan bagi yang lebih maju untuk dikejar. Semua harus mampu berpacu untuk mencapai keunggulan dalam bersaing. Sementara, kehidupan kita didalam negeri justru didera oleh berbagai krisis yang berat. Orde reformasi lahir dan bergerak baik pada sektor publik maupun bisnis serta koperasi. Yang menjadi masalah dan pertanyaan sekarang: "Bagaimana posisi, dinamika, faktor-faktor dan argumentasi dunia usaha kita termasuk Bisnis Koperasi menghadapi era ekonomi global dan orde reformasi?"

Banyak negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain dalam sejarah mencatat bahwa negara itu mencapai kemajuannya terutama karena usaha kecil dan menengah. Posisi dunia usaha bisnis koperasi (BUMK) Indonesia dalam era ekonomi global dan orde reformasi tidak terlepas dari SWOT (*Strenght, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

Keberadaan BUMK dalam kerangka sistem ekonomi nasional secara konstitusional diutamakan. Pelaku ekonomi yang lain BUMN dan BUMS. Kadar kemampuan koperasi untuk bergerak sejajar dengan sektor ekonomi lain masih banyak diperdebatkan dan dipertanyakan. Peran serta bisnis koperasi dalam kegiatan ekonomi Indonesia masih sangat terbatas. Pada akhir Pelita enam ada yang mengatakan kontribusi BUMK terhadap PDB Indonesia baru sekitar 5% sisanya, $\pm 15\%$ disumbang oleh BUMN dan $\pm 80\%$ oleh BUMS. Bahkan ada pendapat yang menyatakan kontribusi BUMK terhadap PDB tidak lebih dari 3% Faktor penghambatnya tidak hanya terletak pada masalah modal dan manajemen ataupun organisasi tetapi yang terpenting terjadinya kesenjangan wirausaha (*Entrepreneurs Gap*) antara BUMS, BUMN dan BUMK itu sendiri.

Sesuai UUD 1945 pasal 33. Ayat (1) memberikan dasar terhadap hak hidup pada BUMK. Ayat (2) dan (3) pada BUMN. Cakupan BUMS tentunya diluar ayat 1, 2 dan 3 tetapi tetap memperhatikan ayat 4. Jadi secara konstitusional keberadaan koperasi dalam kerangka dasar sistem ekonomi nasional diutamakan. BUMK diharapkan mampu menjadi soko guru/tiang penyangga utama bagi kegiatan ekonomi Indonesia. UU RI No.25/1992 tentang Perkoperasian dilihat dari aspek organisasi, permodalan, cakupan usaha dan pengawasan terdapat kesamaan pengelolaan antara BUMK dengan badan usaha lain.

Sesuai Sistem Ekonomi Indonesia BUMK sebagai pelaku ekonomi bersama-sama dengan sektor lain BUMN dan BUMS melakukan pengadaan barang-barang, jasa-jasa ataupun fasilitas-fasilitas. Produk yang dihasilkan untuk dijual atau disewagunakan kepada anggota/masyarakat/pasar sebagai alat pemuas kebutuhan. Hanya produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi yang akan laku dipasar dan dipilih oleh anggota/ masyarakat. Bila masyarakat ternyata dapat

Disampaikan dalam Pelatihan/ Penyuluhan Tanaman Organik Yayasan Suara Hati Lampung, September 2018

dengan mudah memenuhi kebutuhannya disitulah sebenarnya baru terjadi kemakmuran ekonomi.

Skala usaha pelaku ekonomi: BUMN, BUMS dan BUMK dalam membuat produk untuk pasar ada yang berskala kecil, menengah dan besar. Demokrasi ekonomi Indonesia menghendaki peran serta yang merata/seimbang dari ketiga pilar ekonomi yang ada. Bisnis yang kecil - kecil dapat bergabung dalam wadah koperasi agar menjadi kuat dan akhirnya dapat mengimbangi bisnis yang berskala menengah dan besar. Demokrasi ekonomi Indonesia dilaksanakan oleh tiga pilar ekonomi yakni: BUMN, BUMS dan BUMK. Ketiga pilar ekonomi itu memiliki peranan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Mereka tetap memiliki tujuan yang sama yaitu: mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi.

Organisasi dan manajemen BUMK tidak mempraktekan produktivitas/ belum menjadi SDM yang produktif. Kebiasaan mengambil hikmah dari apa saja, kewirausahaan kopersi juga dapat mempelajari berbagai sikap yang kemudian bisa menjadi kebiasaan hidup yakni: berketetapan hati, tidak goyah, tidak ragu sekalipun harus berkorban dan menderita, tetap pada pendirian, tahan uji serta tahan banting.

Kata Kunci:

Posisi, Dinamika, Faktor-faktor dan Argumentasi keberadaan dunia usaha

1.1. Posisi Dunia Usaha dan Koperasi pada Milenium III.

Dunia sekarang sedang mengalami perubahan (*change*) yang sangat mendasar dan pesat. Memasuki milenium ketiga yakni : tahun 2003 sudah berlaku AFTA (*Asia Free Trade Area*). Tahun 2010 akan terjadi percepatan GATT-APEC (*General Agreement Trade and Traf - Asia Pasific Economic Council*) dan tahun 2020 akan dilaksanakan GATT-WTO (*General Agreement Trade and Traft - Word Trade Organization*). Apalagi, tahun 2008 telah terjadi krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika Serikat dan dampaknya merambah pada semua negara di dunia termasuk Indonesia.

Dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tri warsa dari sekarang, berarti akan terjadi perubahan tata ekonomi dunia baru yang mengarah pada era ekonomi global. Secara umum era ekonomi global mengandung makna bahwa transaksi perdagangan barang-barang maupun jasa-jasa, gerakan manusia dan sumber daya/investasi dapat mengalir bebas kesemua negara tanpa adanya rintangan baik yang bersifat tarif ataupun non tarif. Karenanya, *networking*, kompetisi dan intervensi pada era ini akan terjadi dengan sangat tajam serta adakalanya menjadi brutal dan keras.

Perubahan iklim ekonomi global yang panas (dekade 1990 dan 2000-an) yang ditandai: resesi dunia, perdagangan bebas, revolusi komunikasi, *berderless country* dan lain-lain. Hal ini berakibat usaha besar banyak yang menjadi kurang efesien dan fleksibel. Perlu *downsizing*, *relocation*, *outsourcing* dan sebagainya.

Singkat kata peranan usaha besar dalam suatu negara mulai digantikan oleh usaha kecil dan menengah (Ingat: ceritera Dinosaurus dan makluk mamalia kecil yang bernama manusia 60 juta tahun yang lalu). Bahkan banyak negara yang sudah maju seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain dalam sejarah mencatat bahwa negara itu mencapai kemajuannya terutama karena usaha kecil dan menengah.

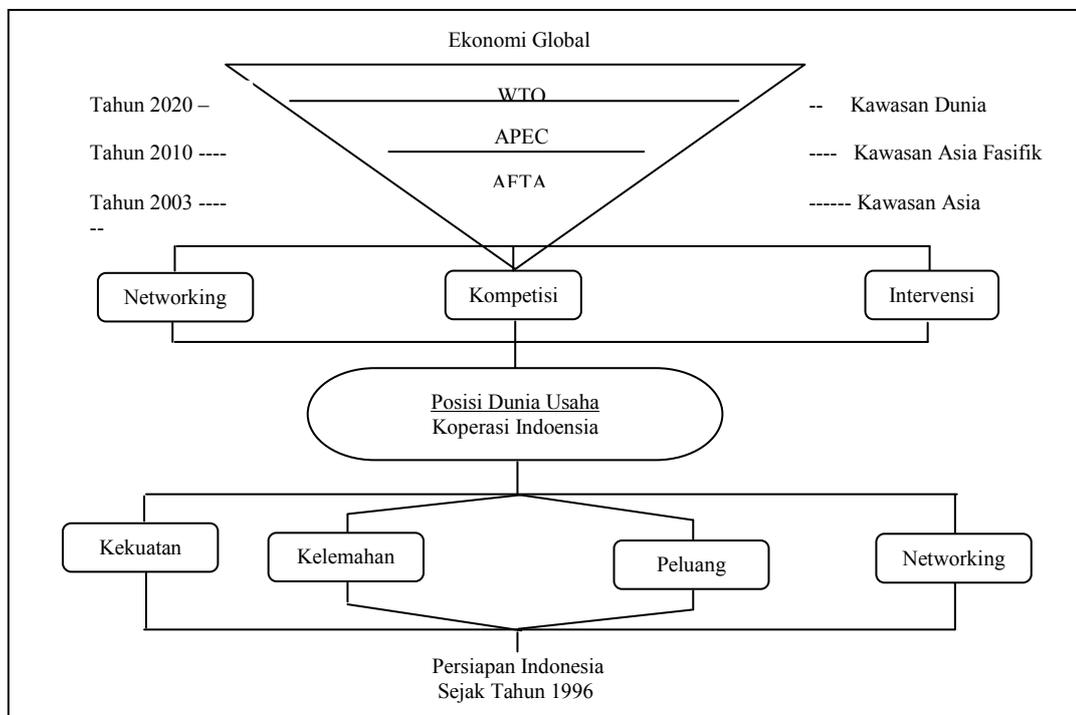
Sebagai ilustrasi, posisi dunia usaha di negara berkembang termasuk bisnis koperasi Indonesia menghadapi tata ekonomi dunia baru yang mengarah para era ekonomi global sangat beragam. Misalnya:

- a. Pendapat Ruslan Abdulgani (dari Indonesia) dalam buku *Globalisasi dan Nasionalisme* yang menyatakan: sebagian besar dunia ketiga memandang globalisasi sebagai kelanjutan dari proses ekspansionisme barat abad ke 17, 18, 19 dan permulaan abad ke-20 yang mengutamakan eksploitasi dunia ketiga untuk kepentingan dunia industri maju serta menciptakan hubungan ketergantungan terhadap dunia industri maju.
- b. Komentar Thonas Ogada (Duta besar dan wakil Kenya di Jeneva), dalam suatu seminar yang menyatakan: "... kita diundang di putaran Uruguay (GATT-WTO) untuk ikut serta dalam rangka mencincang dunia ketiga".
- c. Pernyataan Ruben Recupero (Duta besar dan wakil dunia ketiga di PBB) yang menggambarkan: Dunia ketiga sebagai ayam yang sedang ditanya oleh koki, "Dengan saus apa kau ingin ku lalap?". Ketika ayam itu menjawab bahwa mestinya aku tak usah dimakan sama sekali. Sang koki lalu menyahut: "Ku sepak kau dari kelompok ini" (Hudiono Kadarisman 1997).

Dalam menghadapi era globalisasi ekonomi berarti kebanyakan dunia ketiga termasuk Indonesia sangat pesimis, belum siap dan seperti makan buah simalakama. Tidak ikut dalam tata ekonomi dunia baru akan terisolasi dari percaturan ekonomi bisnis dunia dan bila ikutpun akan kalah dalam bersaing. Namun bagaimanapun dunia usaha termasuk koperasi negara-negara berkembang harus ikut serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam percaturan ekonomi dunia.

Pada masa sekarang sudah saatnya bisnis koperasi dihadirkan kembali sebagai sarana efektif untuk membebaskan masyarakat dari kesengsaraan ekonomi. Bukankah koperasi kali pertama lahir di dunia, juga didorong oleh kesengsaraan masyarakat akibat keganasan kapitalisme? (Nasution, 2007).

Gambar 1. Posisi Dunia Usaha/Koperasi Indonesia pada Era Ekonomi Global.



Sementara kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara memasuki milenium ke tiga justru didera berbagai krisis (*Multidimension Crisis*) yang berat. Orde reformasi lahir dan bergerak diberbagai sektor baik publik maupun bisnis. Reformasi menunjukkan bermacam-macam substansi pokok kehidupan yakni: ekonomi, politik, hukum, sosial budaya bahkan juga bisnis koperasi. Singkatnya posisi dunia usaha/koperasi Indonesia dalam era ekonomi global dan orde reformasi tidak terlepas dari SWOT. Maksudnya dunia usaha/bisnis koperasi Indonesia selain sedikit memiliki kekuatan (*strenght*) dan punya peluang (*opportunities*), juga mempunyai kelemahan (*weaknesses*), dan tantangan (*threats*) yang tidak ringan.

Persiapan Indonesia dalam menghadapi tata ekonomi dunia baru yang mengarah pada era ekonomi global sebenarnya sudah sejak tahun 1996. Saat forum APEC diadakan di istana Bogor Indonesia. Belum lagi kita siap, setahun berikutnya kita bangsa Indonesia justru ditimpa oleh krisis multidimensi.

1.2 Dinamika Perkembangan Tiga Pilar Ekonomi Indonesia

Sebelum sistem kerjasama berkembang dalam masyarakat sebenarnya di Indonesia sudah terdapat kerjasama yang terdapat dalam kehidupan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Karenanya saat menentukan sistem ekonomi yang akan dipergunakan, pemerintah Indonesia memilih sistem ekonomi

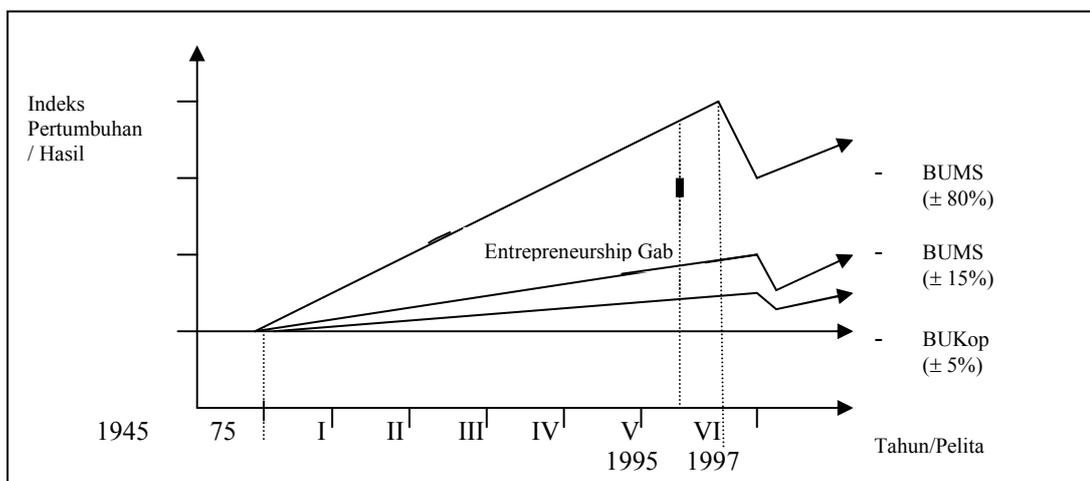
yang bersumber dan mencerminkan nilai budaya masyarakatnya yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini dikenal pula dengan demokrasi ekonomi Indonesia. Hal ini menunjuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pilihan rakyat.

Dengan karakteristik bangsa kita yang demikian Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, ayat 1 menegaskan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lebih lanjut penjelasan pasal itu dinyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah Koperasi. Hal ini berarti keberadaan bisnis koperasi dalam kerangka sistem ekonomi nasional secara konstitusional diutamakan. Sedangkan pelaku ekonomi yang lain ialah Badan Usaha Milik Negara (Bisnis Negara) dan Badan Usaha Milik Swasta (Bisnis Swasta).

Namun demikian diketahui bahwa kadar kemampuan bisnis koperasi untuk bergerak sejajar dengan sektor ekonomi lain (BUMN dan BUMS) masih banyak diperdebatkan dan dipertanyakan. Sorotan yang sering dikemukakan adalah masalah daya tarik serta kontribusi bisnis koperasi dalam memobilisasi dan menopang kegiatan ekonomi negara nampak masih relatif kecil. Ambivalensi terhadap kemampuan bisnis koperasi dengan fenomenanya muncul sejalan dengan dinamika perkembangan sektor ekonomi lain.

Badan usaha milik negara dan swasta telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sedangkan peran serta koperasi dalam kegiatan ekonomi Indonesia masih sangat terbatas. Menurut Ropke (1997) pada akhir Pelita enam kontribusi koperasi terhadap PDB Indonesia baru sekitar 5% sisanya, $\pm 15\%$ disumbang oleh badan usaha milik negara dan $\pm 80\%$ oleh badan usaha milik swasta. Bahkan ada pendapat yang menyatakan kontribusi bisnis koperasi terhadap PDB tidak lebih dari tiga persen

Gambar 2. Perkembangan Tiga Pilar Ekonomi Indonesia dan Kontribusinya Terhadap PDB.



Kontribusi bisnis koperasi Indonesia yang kecil lebih terasa mengingat volume usaha yang kecil dan modal yang disediakan cukup besar serta penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup jauh. Namun demikian dilain pihak mengingatkan kembali pada keberadaan, fungsi dan ruang gerak bisnis koperasi yang strategis. Karenanya berbagai permasalahan serta kelemahan yang dapat menghambat perkembangan koperasi perlu mendapatkan perhatian, diteliti faktor-faktor penyebabnya serta dicarikan jalan/cara-cara pemecahannya.

1.2. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Bisnis dan Koperasi Indonesia

Demokrasi ekonomi kita menghendaki adanya peran serta yang merata/seimbang dari ketiga pilar ekonomi Indonesia yakni: BUMS, BUMN dan BU Koperasi. Namun demikian kadar kemampuan bisnis koperasi untuk dapat bergerak sejajar dengan sektor ekonomi lain masih diragukan dan bahkan banyak masalah. Bila masalah-masalah itu tidak segera dipecahkan tentu dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar. Akhirnya masalah-masalah itu dapat menghambat perkembangan bisnis koperasi dimasa-masa yang akan datang.

Menurut Hatta (1975), bahwa faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis koperasi telah banyak diperdebatkan dimana hampir sebagian besar menyimpulkan adanya kesulitan modal dan mismanajemen sebagai faktor penghambat utama memajukan usaha koperasi. Sedangkan dalam buku, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (1987) beliau menyatakan bahwa organisasi adalah pangkal tolak kekuatan. Karenanya organisasi yang dibangun oleh kapitalisme kolonial hanya dapat dilawan dengan organisasi pula: Organisasi Koperasi.

Setelah ketiga hal yakni: modal, manajemen dan organisasi banyak diperhatikan oleh pemerintah dalam pembinaan bisnis koperasi di Indonesia. Ternyata perkembangan badan usaha koperasi hingga akhir orde baru dan orde reformasi sekarang ini masih belum menggembirakan. Faktor penghambatnya tidak hanya terletak pada masalah modal dan manajemen ataupun organisasi, tetapi yang terpenting terjadinya kesenjangan wirausaha (*Entrepreneurs Gap*) antara BUMS, BUMN dan BU Koperasi itu sendiri. (Ropke, 1997).

Falsafah pengembangan kewirausahaan (termasuk Bisnis Koperasi) dalam konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM) dapat diilustrasikan dengan mengutip sajak ciptaan Ralp Waldo Emerson sebagai berikut:

" A Nation Strength "
*Not gold, but only man can make,
A people great and strong;
Men who for truth and honor's sake,
Stand fast and suffer long.
Brave men who work while others sleep,
Who dare while others fly,
They build a nation's pillars deep,
And lift them to the sky
(By Ralp Waldo Emerson : 1803 - 1882)*

Pengembangan SDM dalam bisnis koperasi berarti diarahkan pada penciptaan manusia yang mandiri, kreatif, inovatif dan proaktif hingga dapat mengantisipasi situasi dan kondisi ekonomi yang semakin mengglobal dan transparan. Sampai saat ini koperasi Indonesia termasuk badan usaha yang belum mampu atau kurang dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang serta kurang bisa mengantisipasi kelemahan dan tantangan yang ada. Singkatnya wirausaha koperasi belum mampu menemukan dan mengkaji serta memanfaatkan informasi tentang keunggulan potensial yang dimiliki koperasi.

1.3. Alasan Hak Hidup Bisnis dan Koperasi Indonesia.

Bisnis Koperasi Indonesia belum dapat bergerak sejajar dengan badan usaha milik negara dan swasta serta masih banyak masalah. Bahkan ketahanan koperasi di arena pasar dalam membina, mengkoordinasikan dan mengembangkan usaha kecil seperti pada masa krisis masih dipertaruhkan. Namun demikian bisnis koperasi sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan dikembangkan di bumi Indonesia sebagai soko guru ekonomi kita. Argumentasi yang dikembangkan untuk menjawab hak hidup bisnis koperasi di Indonesia dapat didekati melalui dua pemikian yakni: nominalis/normatif dan esensialis.

1. Pemikiran Nominalis/Normatif.

Merupakan pemikiran yang didasarkan atas norma-norma, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan atau undang-undang yang berlaku dalam wilayah suatu negara. Norma-norma yang berlaku di Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan sekaligus memberikan hak hidup koperasi Indonesia diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945; sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia khususnya pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 memberikan dasar sebagai berikut :

Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah Koperasi.

Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diatas, berarti ayat (1) memberikan dasar terhadap hak hidup pada Bisnis Koperasi. Ayat (2) dan (3) pada badan usaha milik negara. Sedangkan, cakupan badan usaha milik swasta tentunya diluar ayat 1, 2, dan 3 tetapi tetap memperhatikan ayat 4. Jadi secara konstitusional keberadaan bisnis koperasi dalam kerangka dasar sistem ekonomi nasional diutamakan. Bisnis Koperasi diharapkan mampu menjadi soko guru/tiang penyangga utama bagi kegiatan ekonomi Indonesia.

b. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dengan mencermati undang-undang ini, dilihat dari aspek organisasi, permodalan, cakupan usaha dan pengawasan terdapat kesamaan pengelolaan antara koperasi sebagai badan usaha dengan badan usaha lainnya.

- 1) Aspek Organisasi; terdapat kesamaan perangkat organisasi Bisnis Koperasi yang identik dengan BUMN dan BUMS khususnya PT/PT persero. Rapat umum anggota koperasi identik dengan rapat umum pemegang saham. Pengawas atau badan pemeriksa koperasi identik dengan dewan komisaris dan pengurus koperasi identik dengan direksi atau direktur utama perusahaan.
- 2) Aspek Permodalan; Modal koperasi sebagaimana badan usaha lain tidak semata-mata bersumber dari modal sendiri, tetapi juga berasal dari modal pinjaman. Modal sendiri dapat terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib serta dana-dana lain. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota maupun non anggota koperasi.
- 3) Aspek Cakupan Usaha; Badan usaha koperasi justru mempunyai kelebihan dibandingkan dengan badan usaha lain. Sesuai dengan prinsip identitas, bisnis koperasi tidak saja berkaitan langsung dengan kepentingan anggota

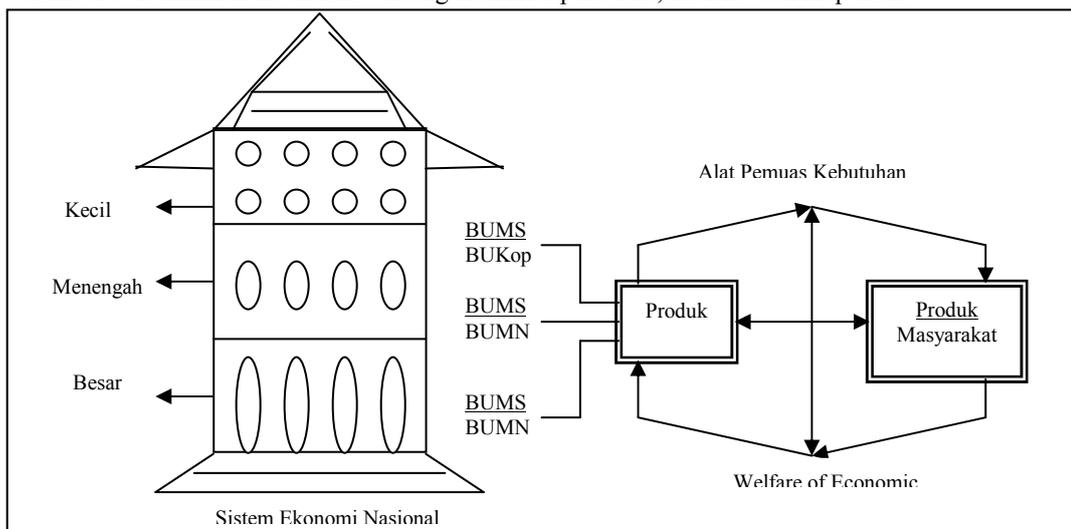
(*In word looking*) tetapi dengan kelebihan kemampuan pelayanan usahanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*out word looking*). Karenanya koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha akan dapat berperan disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat/ masyarakat.

- 4) Aspek Pengawasan; Badan pemeriksa/pengawas bisnis koperasi mempunyai fungsi yang sama dengan dewan komisaris yakni: bertujuan mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan usaha serta kebijakan pengurus sesuai dengan hasil rapat anggota koperasi. Sedangkan pengawasan atas laporan pertanggung jawaban keuangan dapat dilakukan dengan memakai jasa audit akuntan publik seperti halnya BUMN dan BUM Swasta.

2. *Pemikiran Esensial*

Merupakan pemikiran yang melihat esensi atau hakekat bisnis koperasi sebagai badan usaha yang melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip identitas (*members ≡ owner ≡ users/clients*). Sesuai dengan sistem ekonomi indonesia, bisnia koperasi sebagai pelaku ekonomi bersama-sama dengan sektor lain: BUMN dan BUMS melakukan pengadaan barang-barang, jasa-jasa ataupun fasilitas-fasilitas. Produk yang dihasilkan untuk dijual atau disewagunakan kepada anggota/ masyarakat atau pasar sebagai alat pemuas kebutuhan. Tentunya hanya produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggilah yang akan laku dipasar dan dipilih oleh anggota/ masyarakat. Akhirnya bila masyarakat ternyata dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya disitulah sebenarnya baru terjadi kemakmuran ekonomi.

Gambar 3. Pemikiran Esensial tentang Hak Hidup BUMS, BUMN dan Koperasi .



Skala usaha pelaku ekonomi: BUMN, BUMS dan BU Koperasi dalam membuat produk untuk pasar ada yang berskala kecil, menengah dan besar.

Demokrasi ekonomi Indonesia menghendaki peran serta yang merata/seimbang dari ketiga pilar ekonomi yang ada. Karenanya bisnis yang kecil-kecil dapat bergabung dalam wadah bisnis koperasi agar menjadi kuat dan akhirnya dapat mengimbangi bisnis yang berskala menengah dan bahkan yang besar.

Demokrasi ekonomi di Indonesia dilaksanakan oleh tiga pilar ekonomi, yakni: BUMN, BUMS dan BU Koperasi. Walaupun ketiga pilar ekonomi tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Tetapi mereka tetap memiliki tujuan yang sama yaitu: mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi (*Welfare of Economic*).

1.5. Kesimpulan.

Pada orde reformasi dan era ekonomi global dunia usaha/bisnis koperasi Indonesia tidak terlepas dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (*SWOT = Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats*). Karenanya paradigma baru dunia usaha/bisnis koperasi Indonesia harus dapat diarahkan pada penciptaan manusia yang mandiri, kreatif, inovatif dan proaktif hingga dapat mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi yang ada. Singkatnya pengembangan koperasi dalam konteks pembentukan sumber daya manusia harus berorientasi pada jiwa wirausaha atau kewirausahaan.

Sebagai penutup yang mendasari paradigma dunia usaha/bisnis koperasi Indonesia pada orde reformasi dan era ekonomi global disajikan terjemahan dari sajak ciptaan Ralp Waldo Emerson berikut.

" Kejayaan Suatu Bangsa "

Bukan emas, tapi hanya manusia yang dapat berbuat,
Suatu bangsa besar dan jaya
Manusis-manusia yang demi kebenaran dan kehormatan,
Bependirian teguh dan tahan menderita,
Manusia-manusia perkasa yang bekerja dikala orang lain tidur
Yang berani maju dikala yang lain lari mundur,
Mereka menanamkan sokoguru-sokoguru bangsa demikian dalamnya
Dengan mengangkat derajat bangsa menjulang ke angkasa
(*Dari Ralp Waldo Emerson, 1803 - 1882*)

Organisasi dan manajemen bisnis koperasi tidak mempraktekan produkti vitas atau belum menjadi SDM yang produktif. Selain itu kebiasaan mengambil hikmah dari apa saja, kewirausahaan juga dapat mempelajari berbagai sikap yang kemudian bisa menjadi kebiasaan hidupnya yakni: berketetapan hati, tidak goyah, tidak ragu sekalipun harus berkorban dan menderita, tetap pada pendirian, tahan uji serta tahan banting.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred Hanel, Organisasi Koperasi, *Pokok-Pokok Peraturan Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-Negara Berkembang*, Universitas Pajajaran Bandung, 1986.
- Buku Pegangan Kewirausahaan*, UPT – Penerbitan IKOPIN, 1994
- Dominick Solvatore, *Teori Mikro Ekonomi*, Seri Schaum, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991
- Engene A. Diulio, *Teori Mikro Ekonomi*, Seri Schaum, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991
- Eberhard Diilfer., *International Hand Book Of Cooperation Organization*, Handenhulck and Repulick in Golttingen, 1994.
- Ewell Paul Roy. , *Cooperative, Devolepment, Principles and Management*, The Institute Printers and Publisher, Inc, Donelle, Illions, 1976.
- Hans H. Munkers, *Koperasi Untuk Sikaya atau Simiskin*, Universitas Marburg, RFJ, 1985.
- Hoedhiono Kadarisman, *Pola Inkubator, Pedoman Pengentasan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*, PT. IBEC dan PSAC, Jakarta, 1997.
- Ima Suwandi, *Koperasi-Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta. 1982
- Jeffrey S Rayu, *Cooperative Theory*, New Approach, United State Of Agriculture, AS, 1987.
- Jacken Ropke, *Cooperative Entrepreneurship, Entrepreneurial Dynomcis and their Promotion in Self-help Organization*, Marburg Consult Germany, 1992.
- Kisdarto AtmoSoeputro (KAS), *Menuju SDM Berdaya, Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia – Jakarta, 2005.
- , *The Economic Theory Of Cooperative Iinterprise*, Marburg Consult, Germany, 1992
- , *Strategic Management of Self – Help Organizations*, Marburg Consult, Germany.1992.
- Myun W. Lee, *Mari Menciptakan Theory W Gaya Manajemen Korea* (Lets, Make W. Theory) – Terjemahan Chang Van Son, Penerbit Andi Yogyakarta, 1996.
- Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Inti Idayu Press, Jakarta,1971’
- Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, PIP dan LPEK, Jakarta, 2008.

- John P. Kotler dan James L. Hesbell, *Cooperative Culture and Reformance*, Simon and Schuster, Pte, Ltd, Indonesia PT. Prenhalindo, Jakarta, 1992
- Prosiding, *Hasil Seminar Nasional, Kewirausahaan Koperasi*, IKOPIN, Jatinegara, 1993.
- , *Hasil Seminar Nasional, Internalisaasi Program Inkubator Bisnis, Dalam Pembinaan UKM dan Koperasi*, PIBI – IKOPIN , 1996
- , *Hasil Seminar Nasional, Pengembangan Disiplin Ilmu Kewirausahaan di Lingkungan Perguruan Tinggi*, PIBI – IKOPIN, 1997.
- , *Hasil Lokakarya Pengajaran Ekonomi Koperasi di Perguruan Tinggi*, FMP, IKOPIN, Bandung, 1997.
- Richard A. Billas, *Teori Mikro Ekonomi*, PT. Gelora Aksara, Penerbit, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Ronald Kasali, *Sembari Menumi Kopi, Politeking di Panggung Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama dan Majalah Tiara, 1998.
- Sugeng Saryadi, *Reformasi Kebijakan Menyongsong Milenium Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Stephen R. Covey, *The Seven Habits of Highly Effective People*, Seamon and Schuster, Inc, Di Indonesia Oleh Binarupa Aksara, Jakarta, 1994.
- Tri Guno, *Budaya Kerja, Menciptakan Lingkungan Yang Kondisive Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*, PT. Golden Terayan Press – Jakarta, 1997.
- Undang-Undang RI no 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, Arikha Media Cipta, Jakarta